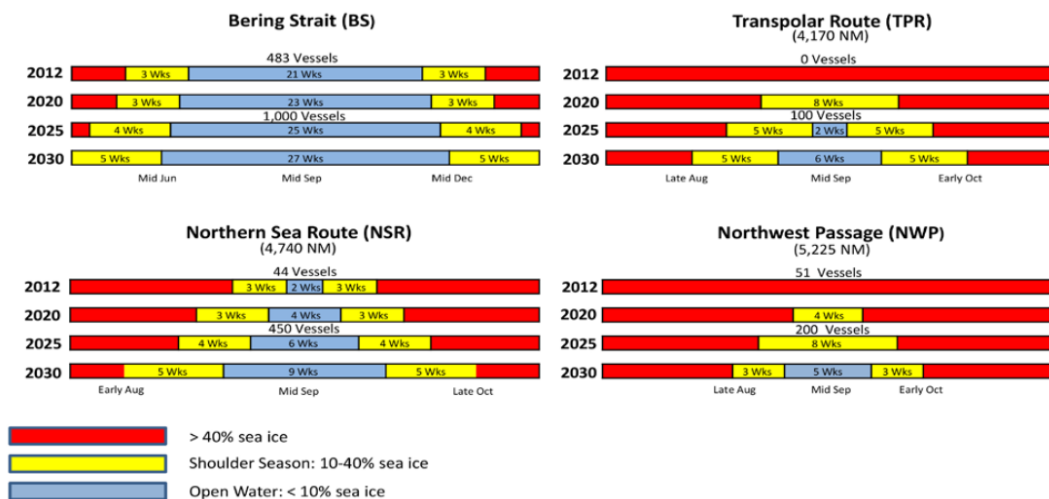


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah regional Arktik terletak di Kutub Utara merupakan permukaan sebagian besar tertutup oleh bongkahan es yang luas. Potensi Arktik sebagai kawasan yang ramai aktivitas oleh berbagai negara semakin intens saat terbukanya jalur pelayaran akibat es yang mencair (Brooke, 2019). Berikut Gambar 1.1 menunjukkan grafik dalam kurun waktu 2012-2030 tentang kemungkinan pencairan es di Kutub Utara berdasarkan perkiraan *United States Department of Navy* pada tahun 2014 (Wishnick, 2017).

Gambar 1. 1 Pencairan Es di Jalur Pelayaran Arktik



Sumber : U.S.Department of the Navy.

Pesatnya proses pencairan es merupakan katalisator perubahan paling signifikan yang dialami negara-negara Arktik (Klimenko, 2019). *US Navy Department* memperkirakan bahwa jalur *Northern Sea Route* (Bagian Utara Rusia) dan *Northwest Passage* (Bagian Utara Amerika Serikat) menjadi alternatif yang potensial sebagai jalur pelayaran di masa depan seiring dengan mencairnya es di Kutub Utara (Wishnick, 2017). Dari data ini, selain Selat Bering yang telah lama pelabuhan penghubung Amerika Serikat-Rusia, *Northern Sea Route* dan *Northwest Passage* terbukti mampu mengakomodasi jalur pelayaran jarak jauh dengan angka hampir mencapai 100 pelayaran dalam satu tahun.

Sejak 1996, kawasan Arktik dipimpin oleh sebuah forum *inter-governmental* bernama *Arctic Council* yang berperan mereduksi perubahan iklim akibat mencairnya es di kutub (Ottawa 1996 Declaration, 1996). Anggota tetap dari *Arctic Council* terdiri atas Amerika Serikat, Russia, Finlandia, Iceland, Swedia, Norwegia, Denmark, dan Canada. Hingga pada 1998, setiap periode lima tahun akan dipilih negara diluar anggota sebagai observer (Arctic Council, 2013a).

Sebagai kawasan yang jarang menjadi mendapat perhatian bagi kebanyakan negara, Arktik dalam satu dekade terakhir, dan akan terus berlanjut, memunculkan multi isu yang membuat wilayah regional ini bukan hanya sebagai dataran yang dingin, tetapi telah berkembang menjadi *hot-spot* dalam geopolitik (Brooke, 2019).

Isu geopolitik semakin berkembang dan membuktikan jika urgensi aktivitas di Arktik selain terkait perlindungan ekologi kawasan, namun juga tentang potensi kerjasama dan perebutan pengaruh antar negara akan kawasan baru yang menguntungkan (Zandee & Kruijver, 2020). Dengan kawasan Arktik yang mampu

menyebabkan perubahan iklim secara luas di berbagai negara, pada akhirnya negara non-anggota *Arctic Council* juga turut mengambil tindakan, Tiongkok salah satunya.

Tiongkok mengumumkan *white paper China's Arctic Policy* pada 26 Januari 2018 (BBC, 2018). Pengumuman tersebut merupakan pertama kalinya Tiongkok mengeluarkan kebijakan strategis khusus yang di tempuh Tiongkok di wilayah Arktik. Rilis kebijakan ini diumumkan oleh *China's State Council Information Office* yang mencakup strategi dan perluasan orientasi peran aktif Tiongkok dalam partisipasinya di wilayah regional tersebut. Visi Tiongkok bernama "*Polar Silk Road*" dalam *white paper* secara garis besar ialah riset saintifik *eco-environment* dalam perubahan iklim, pemanfaatan sumber daya secara rasional yakni dalam pengembangan jalur pelayaran dan eksplorasi tambang, serta merawat kerjasama dengan negara-negara *Arctic Council* guna mempromosikan stabilitas dan perdamaian (China's Arctic Policy, 2018).

Dari pengumuman ini, Wakil Menteri Luar Negeri, Kong Xuanyou, menyebutkan istilah Tiongkok sebagai *near-arctic state* yang berarti negara kontinental yang dekat dengan Arktik (World Economic Forum, 2019). Kendati orientasi Tiongkok semakin luas, namun klaim Tiongkok sebagai '*near arctic state*' memunculkan multi interpretasi. Klaim narasi status lantas dipertanyakan akan urgensi dan latar belakang atas perilisan *white-paper* ini. Sejak dimunculkannya narasi '*near-arctic state*' tersebut, kebijakan politik luar negeri Tiongkok cenderung semakin progresif dalam bidang perwujudan jalur ekonomi baru

dibandingkan dengan masa-masa sebelum menjadi bagian dari observer-states *Arctic Council*.

Kritisi muncul, salah satunya respons Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, saat berpidato dalam forum *Arctic Council* di Rovaniemi, Finlandia pada tahun 2019. Dalam pidatonya, Pompeo secara tegas menilai jika status Tiongkok sebagai *near-Arctic state* merupakan pernyataan yang bertentangan dengan hukum (CBC News, 2019). Pompeo menekankan jika jarak Tiongkok dengan Arktik yang masih terlampaui jauh, yakni 900 mil tidak cukup sebagai klaim, sehingga status yang diakui hanya *Arctic states* dan *non-Arctic States*.

Sikap Amerika Serikat terhadap aktivitas Tiongkok dengan keanggotannya di *Arctic Council* juga dijelaskan dalam rilisan *US Department of Defense Arctic 2019*. Di dalam beberapa poin pembahasan, penyebutan Tiongkok mengarah kepada tindakan berlebihan di Arktik. Diantaranya ialah kritik terhadap *white paper* Tiongkok di Arktik, pelayaran Xuelong yang bermakna ganda antara riset dan militerisasi, serta kekhawatiran terhadap hubungan Rusia-Tiongkok di Arktik yang bisa menimbulkan ketidakstabilan geopolitik (US Department of Defense, 2019)

Sedangkan di sisi Kanada, pada awal diresmikannya observer yang baru di tahun 2013, Perdana Menteri Kanada Stephen Harper mengatakan jika keikutsertaan observer merupakan keuntungan status yang diberikan *Arctic Council*, sehingga negara-negara sudah seharusnya melakukan introspeksi terkait tindakan-tindakan di kawasan Arktik. Sedangkan perwakilan Swedia mengatakan bahwa untuk pengganggu-pengganggu baru di Arktik, negara harus bertindak 'mengangkat senjata' bila diperlukan (Doshi et al., 2021).

Tanggapan kritik di atas semakin menunjukkan bahwa persepsi negara-negara Arktik terhadap peningkatan intensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun lalu. Gao Feng sebagai Menteri Luar Negeri Tiongkok sekaligus perwakilan negara di *Arctic Council* membalas dengan pernyataan bahwa peserta forum tidak selayaknya menyetujui pidato dari sebuah negara yang hendak hengkang dari Paris Agreement, yang ditujukan kepada Amerika Serikat pada saat itu. Hal ini akan menimbulkan tafsiran dan pandangan yang buruk dalam menata era Arktik yang baru (New York Times, 2019). Faktor persepsi eksternal yang belum pernah terjadi sebelumnya juga dilayangkan dari perwakilan Norwegia bahwa tiap negara harus membayar arogansi dalam memulai konflik, yang secara implisit ditujukan kepada Tiongkok (Doshi et al., 2021).

Secara historis, Tiongkok sudah terlibat dengan beberapa kegiatan riset di wilayah Arktik. Pada tahun 1925, Tiongkok turut menandatangani Svalbard Treaty yang substansinya mengenai kewenangan negara Norwegia atas teritori Svalbard yang masuk wilayah perariran Arktik (Lanteigne, 2015). Selanjutnya, Tiongkok berhasil melayarkan ekspedisi kapal pemecah es Xuelong untuk pertama kalinya untuk kepentingan riset pada 1999 (Lanteigne, 2017). Tiongkok juga berkontribusi pada pembangunan stasiun *Arctic Yellow River Station* di Spitzbergen (Bennett, 2015). Dan pada akhirnya, Tiongkok memberikan pernyataan akan ketertarikan sebagai *observer* di *Arctic Council* pada 2007, meski baru resmi status ditetapkan pada tahun 2013 (Zheng, 2019). Sejak saat itu, klaim Tiongkok atas kegiatannya di wilayah Arktik masih berfokus pada upaya riset penanggulangan atas perubahan

iklim dengan multi disiplin keilmuan. Utamanya, dampak perubahan iklim tersebut yang memengaruhi keadaan klimatologi dalam negeri Tiongkok.(Singh, 2016).

Pada tahun 2017, dalam perhelatan 19th *National Congress Communist Party of China*, kedatangan Perdana Menteri Rusia, Dmitri Medvedev disambut baik dengan jalinan kerjasama terbaru oleh Presiden Tiongkok, Xi Jinping (China Daily, 2017). Momen ini cukup menjanjikan bahwa peran Xi Jinping signifikan dalam menata konsep dan rencana baru di Arktik. Melalui pertemuan ini Rusia sepakat dalam membantu upaya pembangunan *Polar Silk Road* (PSR). PSR ialah jalur pelayaran kapal yang melalui bagian dari *Norththorn Sea Route* dan banyak bersinggungan dengan peabuhan-pelabuhan milik Rusia. Kemudian di dalam bidang hukum internasional, dengan wilayah Arktik yang juga menyangkut wilayah perairan laut, Tiongkok juga berhadapan dengan rezim *United Nation on the Law of the Sea* (UNCLOS). Sedikit berbeda dengan isu Laut China Selatan, Tiongkok berupaya untuk senantiasa menghormati kode-kode regulasi yang menyangkut wilayah teritori ZEE di zona Arktik (C. T. N. Sørensen & Klimenko, 2017). Sebagai contoh kepatuhan ini salah satunya dibuktikan dari turut sertanya Tiongkok dalam *Illusat Declaration 2008* yang menyangkut aturan pengangkutan di pelabuhan negara-negara pantai Arctic-states (C. T. Sørensen & Klimenko, 2017).

Bentuk-bentuk kepatuhan tersebut merupakan komitmen Tiongkok dalam melangkah lebih jauh lagi dalam berperan aktif di wilayah Arktik. Pertama, terbukanya jalur pelayaran akibat mencairnya es di kutub membawa keuntungan, tidak terkecuali Tiongkok. Sebagai perbandingan, jika pelayaran melalui Shanghai ke Amsterdam akan melalui waktu yang lebih lama jika melalui jalur

selatan(O'Brian, 2013). Selain itu, adanya anggapan bahwa terdapat *Malacca Dilemma*, yaitu kekhawatiran akan jalur konvensional selatan kerap kali menemui ancaman dari aksi perompakan (Singh, 2016). Dengan rute yang lebih pendek dan keadaan air yang lebih tenang di jalur utara melalui perairan Arktik, estimasi waktu pelayaran juga akan lebih efisien.

Kedua, peluang untuk membuka wilayah komoditas tambang juga semakin terbuka atas mencairnya es di Kutub Utara. Wilayah Arktik diperkirakan menyimpan cadangan sumber daya sebesar 13% dari total cadangan migas dunia(Pelaudeix, 2018). Bukti kuat bahwa Tiongkok bergerak dalam eksplorasi tambang ialah adanya kepemilikan saham perusahaan tambang migas Novatek milik Russia oleh China National Petroleum Corporation (CNPC)(High NorthWest News, 2019). Kerja sama dengan Russia ini menjadi salah satu rangkaian proyek Yamal LNG, yaitu aktivitas penambangan migas di pelabuhan Yamal, Russia.

Dari adanya bukti keterlibatan Tiongkok dalam aspek ekonomi, hal ini membuktikan bahwa terdapat tendensi perkembangan implementasi serta kerja sama di dalam regional Arktik. Maka dari itu, penelitian bertujuan untuk menjelaskan sebab Tiongkok partisipasi berpartisipasi Arktik melalui keanggotaan di Arctic Council. Momentum dirilisnya *white paper* China's Arctic Policy menjadi penanda kebijakan luar negeri Tiongkok secara resmi mengungkap arah tujuan negara yang menarik untuk dianalisis. Hal lain yang akan dibahas adalah tentang strategi Tiongkok di Arktik yang pada akhirnya mendorong Tiongkok bergerak lebih intens dan mendapatkan respon suportif dari negara-negara anggota *Arctic Council*.

Penelitian sebelumnya tentang pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri ditulis oleh Yun. Menurut Yun (2018), kebijakan Tiongkok dalam dipengaruhi oleh kontribusi historis Tiongkok sejak dibentuknya beberapa lembaga riset khusus. Karena terdiri atas beberapa lembaga pendorong kebijakan, maka penulis menggunakan konsep intrikasi atau kompleksitas yang terdiri atas elemen-elemen pendukung Lembaga ini diantaranya, *Chinese Arctic and Antarctic Administration (CAAA)*, *Polar Research Institute of China (PRIC)*, aktor komersial, dan tingkat kementerian. Argumen Yun bahwa pendekatan Tiongkok tertuju pada *soft issues* yang menyangkut riset, dan kerjasama ekonomi. Sehingga Tiongkok tidak mengejar aspek keamanan, politik dan militer. Namun sayangnya penulis justru lebih menjelaskan cakupan tugas normatif masing-masing lembaga, secara luas, bahkan diluar relevansi isu Arktik. Integrasi peran ini kurang dijelaskan secara konseptual dan cenderung mencitrakan aktor-aktor yang berjalan di tugas pokok masing-masing. Intrikasi yang dimaksud juga tidak memasukkan unsur nilai yang diyakini, serta unsur kepemimpinan sebagai faktor yang berpengaruh.

Linda Jakobson dan Jingchao Peng dalam tulisannya *China's Arctic Aspirations* (2012) berpendapat bahwa cara Tiongkok mengeluarkan kebijakan luar negeri dengan mendekati Arktik dianggap tindakan asertif karena berupaya mendapatkan klaim atas kewenangan di suatu regional, sama seperti upaya Tiongkok di Laut China Selatan. Sama seperti Yun, Linda dan Peng juga menyertakan aktor-aktor yang kompleks dalam menyadari dan turut serta dalam isu perubahan iklim di Arktik. Tetapi tulisan ini diselesaikan pada tahun 2012, sebelum disetujuinya Tiongkok sebagai observer states di *Arctic Council* dan jauh sebelum

dikeluarkannya China Arctic Policy. Peneliti merasa perlu untuk melihat perkembangan narasi atas tindakan terbaru Tiongkok dalam melakukan peran aktif di Arktik.

Bennett (Bennett, 2015) dalam tulisan "*How China Sees the Arctic : Reading Between Extraregional & Intraregional Narratives*", penulis mengungkapkan upaya pendekatan Tiongkok merupakan upaya peleburan status-status Arctic-state. Bennett meyakini jika keberadaan Arktik dan perairannya sendiri belum sempurna dan inkonsisten dengan prinsip UNCLOS yakni *mare nostrum* (laut bersama). Sehingga negara-negara yang termasuk extraregional berupaya membangkitkan narasi *global environment* kepada Arctic atas dasar kesadaran akan perubahan iklim yang harus disadari bersama. Identitas Tiongkok dibentuk atas dasar pencapaian historis dalam rangkaian eksplorasi. Sehingga bagi negara-negara observer di *Arctic Council*, upaya peran aktif ini diasosiasikan sebagai *disimperialized effort* guna mengurangi kekuatan negara-negara *Arctic Council*.

Upaya analisis juga dituliskan oleh Havnes (2020), yang mencoba menjawab faktor kausal Tiongkok guna mengubah pandangan sebagai *undermining rule-based state* dalam mengejar kepentingannya di Arktik. Dengan pendekatan Piecemeal Theory, Havnes berargumen jika cara Tiongkok berada di tahap mematuhi legitimasi negara-negara *Arctic Council*. Namun Havnes memberi konklusi bahwa skenario akhir dari tindakan Tiongkok ialah ambisi menjadi pemeran kunci utama di Arktik yang di dalamnya juga menyangkut kekuatan militer. Tiongkok juga dinilai cenderung akan selalu konsisten menjaga partisipasi

ketaatan hukum internasional yang berlaku, baik dari kesepakatan *United Nation on the Law of the Sea* (UNCLOS) maupun *International Maritime Organization* (IMO). Selain itu, Tillman dkk (Tillman et al., 2018) juga memberikan sumbangsih argumentasi tentang dinamika partisipasi Tiongkok dalam membangun Polar Silk Road (PSR) yang dipengaruhi oleh semangat kerjasama. Elaborasi fase-fase kerjasama dijelaskan secara runtut, dan menganggap jika PSR merupakan upaya kerjasama Tiongkok hanya dengan negara Rusia dan Nordic-state yang sesuai dengan relevansi kepentingannya, minus kerjasama dengan Amerika Serikat. Sayangnya tulisan ini minim pembahasan teoritis, sehingga cenderung bersifat reportase kiprah Tiongkok membangun kerjasama.

Dengan adanya literatur terdahulu, penulis akan berupaya dalam mengisi celah kekosongan penelitian yang telah ada sebelumnya. Penulis akan menggunakan konsep *adaptive behavior of foreign policy* sebagai bagian dari perspektif kebijakan luar negeri dalam menjelaskan alasan Tiongkok tetap melanjutkan partisipasi di Arktik melalui keikutsertaan di *Arctic Council*. Dengan konsep ini, penulis akan menjelaskan bentuk faktor adaptasi sebagai variabel independen dan signifikan guna menunjang pemahaman akan kebijakan luar negeri Tiongkok di Arktik tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibangun tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah mengapa Tiongkok berpartisipasi dalam *Arctic Council* dengan status keanggotaannya sebagai negara observer?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab dan alasan Tiongkok dalam partisipasi keanggotaannya sebagai negara observer *Arctic Council*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Memberikan perspektif alternatif dalam ilmu hubungan internasional, khususnya kajian kebijakan luar negeri suatu negara terhadap isu regional di kawasan Arktik
2. Menjadi sumber referensi dalam pengambilan kebijakan luar negeri terkait dengan isu perubahan iklim di kawasan regional Arktik.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Konsep Adaptive Behavior

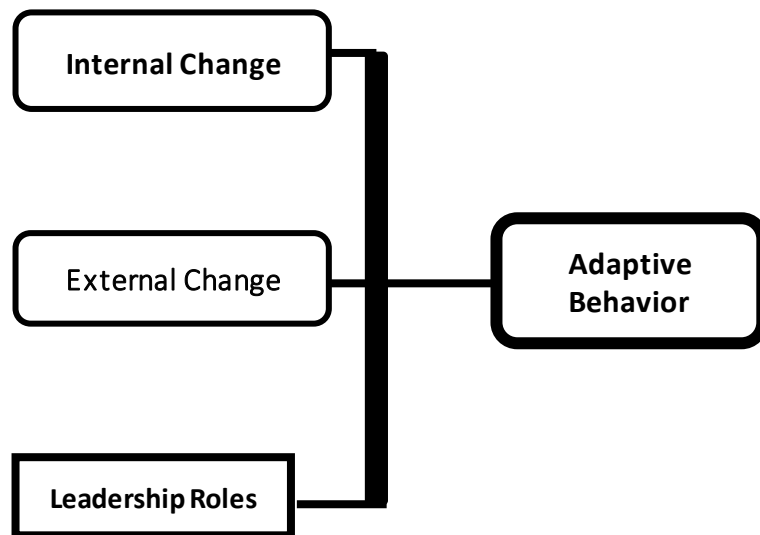
Adaptive Behaviour atau konsep adaptasi merupakan analisis tentang kebijakan luar negeri melalui pendekatan adaptasi atas lingkungan eksternal dan internal (Rosenau, 1970). Rosenau memberikan analogi bahwa negara sebagai masyarakat nasional (*society*) dan struktur internasional sebagai sebuah lingkungan (*environment*). Argumen utama dari konsep ini menekankan bahwa negara membutuhkan adaptasi terhadap dinamika politik internasional hanya pada isu yang memiliki relevansi dan dampak fundamental atas struktur domestiknya. Sehingga, perubahan-perubahan dalam struktur internasional akan melalui proses pemilihan (*choices*) terbaik agar suatu negara mampu merencanakan strategi terhadap perubahan tersebut.

Kebijakan luar negeri merupakan sebuah hasil atas kompleksitas interpretasi. Pelaku yang terlibat di dalamnya ialah individu, nilai - nilai yang dianut oleh elit politik, sejarah bangsa, hasil tuntutan dan ide masyarakat, dan hasil atas integrasi ide ide yang dibuat oleh para aktor (Hermann, 1971). Tindakan ini bersifat otoritatif oleh aktor pemerintah dan lembaga pendukung dalam menanggapi pemeliharaan hubungan dengan lingkungan internasional yang sesuai relevansi nilai yang dianut (Hermann, 1971). Motif di balik sebuah keikutsertaan atau partisipasi negara dalam isu yang memiliki relevansi dikenal sebagai perwujudan dari salient environment. Salient environment berarti bahwa sebuah entitas negara yang

disebut sebagai environment akan mengikuti dan beradaptasi terhadap setiap perubahan yang berdampak signifikan pada kebutuhan negerinya (Rosenau, 1970 :9)

Dengan menggunakan konsep *adaptive behavior*, kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh *internal change*, *external change*, dan *leadership roles*.

Gambar 1. 2 Bagan Variabel Konsep Adaptive Behavior



Sumber : Telah diolah kembali dari Rosenau,1970

Internal change adalah perubahan-perubahan dinamika yang terjadi di level domestik suatu negara. Awal mula perubahan disebabkan oleh adanya respons terhadap perubahan yang terjadi di level eksternal. Bentuk konkretnya berupa kebijakan publik, pergeseran nilai dalam pemahaman negara, serta perkembangan yang mendorong kemajuan terhadap upaya adaptasi.(Rosenau, 1970 :10). Pengertian *internal change* juga berisi tentang perubahan personel yang terdapat di suatu lembaga jika ada. Atau

hal ini juga menyangkut pergantian seorang pemimpin yang membawa perubahan tertentu. Namun hal-hal yang fundamental ialah terkait dengan visi dan nilai suatu lembaga negara yang terhubung dengan kebutuhan nasional atau keinginan masyarakatnya. Hal ini akan berdampak pada keikutsertaan aktor-aktor lain selain lembaga negara untuk turut serta bertanggung jawab atas tata pengelelolaan aspirasi di tingkat negara. (Rosenau, 1970 :11). Sehingga pada akhirnya terdapat integrasi baik dari negara maupun aktor non-negara yang berasal dari domestik untuk menjadi indikator perubahan tersebut

Sedangkan *external change* merupakan perubahan yang terjadi pada level *international environment*. Jangkauan dari perubahan ini dapat berupa lingkup regional ataupun sampai level internasional. Bentuk perubahan ini dapat berupa kondisi hubungan antar negara, perjanjian-perjanjian baru, perspektif banyak aktor tentang perubahan tersebut, sampai dengan isu permasalahan yang muncul (Rosenau, 1970 :13).

External changes erat kaitannya dengan cara pemerintah memberlakukan kebijakan luar negerinya dalam menemukan metode terbaru untuk menyesuaikan dengan *international environment*. Tindak lanjutnya dapat mengarah kepada dua hal, menjauh dari hubungan atau justru merekatkan hubungan. Jika semakin dekat maka bentuk penyesuaiannya ialah penguatan terhadap aliansi atau regional. Sedangkan apabila tidak dapat menyesuaikan dan justru menjauh dari perubahan maka dapat saja terjadi pemutusan hubungan diplomatik atau munculnya konflik.

Kemudian variabel ini juga menilai perubahan dalam sosial ekonomi ditandai dengan semakin terbukanya negara dalam mengelola pasar. Jika ini terjadi, maka negara tersebut sedang beradaptasi untuk secara persuasif menawarkan dirinya untuk mengubah pola kerja sama ekonomi perdagangan agar lebih menguntungkan (Rosenau, 1970 :13).

Terakhir, variabel *leadership roles* memberikan sumbangsih kapabilitas negara dalam membangun kerangka kebijakan luar negeri yang diadaptasi dari adanya perubahan-perubahan. Aktor yang menjalankan fungsi leadership ini dianggap sebagai salah satu faktor esensial yang membawa penilaian serta pandangan negara terhadap *international environment*. Peran lanjutannya, dalam konsep yang dituliskan Rosenau ini menilai jika keberadaan leadership roles ada pada setiap perubahan, baik internal maupun external. Tokoh tersebut mempunyai fungsi dan wewenang untuk menetapkan bentuk dari pilihan atas *salient environment* yang dituju demi pemenuhan kebutuhan negara. Pergantian kepemimpinan adalah faktor yang sering menjadi penanda perubahan-perubahan tersebut muncul. Semakin tokoh pemimpin tersebut mampu mengartikulasi perubahan internasional dengan bentuk kebijakan yang rasional dan mengantisipasi hal-hal buruk yang dapat terjadi, maka semakin sesuai suatu negara dalam menentukan hal-hal yang penting bagi masyarakatnya (Rosenau, 1970 :12)

Kemudian, arti dari kebijakan luar negeri menurut Rosenau terbagi atas prosesnya. Terdapat cluster yang menunjukkan tingkatan sebuah kebijakan luar negeri itu dipelajari, dirumuskan, dan dijalankan. Guna

membedah sebuah kebijakan luar negeri, konsep ini berfungsi juga untuk menentukan faktor paling kuat yang mempengaruhi tindakan tersebut berjalan. Menurut Rosenau kebijakan luar negeri memiliki ruang arti tersendiri. Berikut makna kebijakan luar negeri menurut Rosenau. 1) *Orientation* terdiri atas bentuk sikap, persepsi. Menjadi arah pemerintah untuk menghadapi kemungkinan fenomena internasional yang mengharuskan negara mengambil tindakan. 2) *Set of Commitment and Action*: Jalan untuk menyatakan strategi, kebijakan yang sudah diobservasi sebelumnya, keputusan nyata. kebijakan ini terjadi sebab sudah terhubung dengan keadaan external environments. Tujuannya lebih spesifik. Disebut sebagai penerjemahan dan perpanjangan dari orientasi. 3) *Form of Adaptive Behavior*: Fase empiris yang terdiri atas tindakan-tindakan perpanjangan dari orientasi.

Perilaku negara dalam ranah internasional perlu perhitungan dan orientasi tujuan, serta kesiapan atas konsekuensi dalam melakukan proses adaptasi dalam periode waktu tertentu. Konsep *adaptive behavior* ini merupakan salah satu dari tiga rangkaian teori Rosenau atas kebijakan luar negeri (Rosenau, 1967). Konsep lainnya ialah konsep *orientation* dan konsep *plans for action*. Konsep *adaptive behavior* memberikan nilai bahwa kebijakan luar negeri berperan sebagai penjelas atas bentuk rangkaian tindakan empiris serta berbentuk general menurut konsep orientasi dan *action for plans*.

Oleh karena argumen Rosenau terhadap konsep adaptasi berpihak pada perilaku negara dalam merespons dinamika internasional, maka penelitian ini akan berfokus bagaimana perilaku negara dalam menanggapi perubahan-perubahan, terutama yang berasal dari lingkungan eksternal atau maupun internal. Perilaku ini pada umumnya juga mempertimbangkan atas posisi suatu negara baik dalam sisi geopolitik maupun catatan historis yang pernah dicapai. Dan sebagai catatan bahwa usulan atas pertimbangan-pertimbangan ini muncul atas tuntutan internal dari golongan masyarakat yang memiliki kesadaran bahwa keadaan lingkungan internasional telah memberi dampak yang cukup signifikan dalam kegiatan sehari-hari.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 Adaptive Behavior

Adaptive Behavior merupakan tindakan penyesuaian negara dalam kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh respon eksternal dan internal atas terjadinya perubahan-perubahan (Hermann, Rosenau, 1973). Tujuan dari adanya *adaptive behavior* ini ialah membangun dan memelihara hubungan dengan *international environment* guna menjaga relevansi isu nasional.. Kebijakan luar negeri merupakan sebuah hasil atas kompleksitas interpretasi. Pelaku yang terlibat di dalamnya ialah individu, nilai - nilai yang dianut oleh elit politik, sejarah bangsa, hasil tuntutan dan ide masyarakat, dan hasil atas integrasi ide ide yang dibuat oleh para aktor

(Hermann, 1971). Tindakan ini bersifat otoritatif oleh aktor pemerintah dan lembaga pendukung dalam menanggapi pemeliharaan hubungan dengan lingkungan internasional yang sesuai dengan nilai dianut negara (Hermann, 1971).

1.6.1.2 Partisipasi

Partisipasi berarti keadaan mental dan emosional dalam proses masuknya seseorang yang masuk ke dalam kelompok dengan adanya niat berkontribusi dalam tujuan kelompok dan menunjukkan tanggung jawab demi meraih tujuan tersebut (Davis & Werther, 1989). Sedangkan Menurut Uphoff dan Cohen (Cohen & Uphoff, 1980) ialah gambaran mengenai keikutsertaan banyak orang dan dalam kondisi yang berbeda-beda untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang diinginkan. Sedangkan di dalam ranah hubungan internasional, partisipasi merujuk kepada masuknya negara ke regionalisme yang berarti sebuah keterkatikan untuk membentuk dan menggerakkan kelompok regionalisme yang berasal dari ketertarikan domestik dan menunjukkan representasi nilai (Solingen, 1998). Dari bukti ini maka partisipasi di level internasional berarti kehendak untuk bergabung dalam suatu regional atau organisasi internasional tertentu untuk meraih tujuan tertentu dari sebuah negara yang dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal.

1.6.1.3 Choices dan salient environment

Choices dan Salient Environment merupakan konsep dalam turunan fitur *adaptive behavior* yang mengarah kepada pemilihan terhadap penanganan isu internasional dan bersifat relevan (Rosenau, 1970 :9). Maksud dari relevan ini ialah eksistensi perubahan isu eksternal memiliki pengaruh tertentu, sehingga suatu negara mau terlibat dalam perputaran isu tersebut. Proses ini merupakan salah indikator adaptive behavior pada suatu negara terhadap perubahan-perubahan di level internasional (Rosenau, 1970 :10).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Adaptive Behavior

Dalam penelitian ini, maka subjek penelitian berfokus perilaku Tiongkok yang berperan aktif di wilayah Arktik melalui partisipasi di *Arctic Council*. Adaptasi dilakukan dalam kebijakan luar negeri Tiongkok berkaitan dengan semakin bergesernya pandangan internasional terhadap isu perubahan iklim di Arktik. Yakni bukan hanya terkait dengan riset dan eksplorasi pengetahuan. Namun juga potensi jalur pelayaran baru yang membawa efisiensi serta keuntungan dari adanya potensi komersial komoditas migas di Arktik. Selain itu juga, upaya penyesuaian juga didefinisikan dengan bagaimana kondisi eksternal memberikan respon terhadap upaya Tiongkok di Arktik selama ini.

1.6.2.2 Partisipasi

Di dalam penelitian ini, partisipasi yang dimaksudkan ialah keterlibatan Tiongkok di dalam *Arctic Council*. Kegiatan dan tujuan yang dibahas ialah mengenai riset perlindungan lingkungan Arktik, perubahan iklim, pemberdayaan kelompok Indigenous People, dan strategi memanfaatkan sumber daya alam secara adil. (Arctic Council, 2013). Dengan ini seluruh golongan anggota Arctic Council bertanggungjawab dalam melakukan kerja riset, penilaian, merumuskan strategi, yang nantinya akan diberikan pada rekomendasi *working groups*. Status Tiongkok sebagai negara observer juga berlaku untuk mengerjakan hal-hal demikian. Tiongkok sebagai negara observer mengambil peran dalam memberikan rekomendasi serta pandangannya ke depan mengenai berdasarkan hasil riset oleh kelompok ilmuwan, pakar politik, dan lembaga yang terkait dengan relevansi di *working groups*.

1.6.2.3 Choices dan salient environment

Choices dan Salient Environment di dalam studi kasus ini berhubungan dengan orientasi Tiongkok dalam keanggotannya di *Arctic Council*. Tindakan yang dilakukan Tiongkok dibentuk dari perubahan-perubahan di kawasan Arktik dengan semakin memipisnya bongkahan dan partikel es yang menimbulkan akibat

mutli bidang. Maka Tiongkok dalam hal ini kerap menunjukkan ketertarikannya di *Arctic Council* untuk berkontribusi dalam menangani isu lingkungan berhubungan dengan perubahan iklim. Sebab keadaan di dalam negeri Tiongkok mengalami dampak signifikan pada sektor agraria dan tentang peningkatan suhu. Selain itu juga, Tiongkok mempertimbangkan serta mendorong Arktik sebagai kawasan yang bermanfaat ekonomis dari segi sumber daya alam dan rute pelayara kapal bila dikelola dengan baik dan adil.

1.7 Argumen Penelitian

Peneliti memiliki argumen dalam penelitian bahwa partisipasi Tiongkok di dalam keanggotaan *Arctic Council* sebagai negara observer ialah bentuk dari adaptasi Tiongkok dalam menghadapi perubahan-perubahan isu regional Arktik yang terjadi di level *international environment* dan bersifat eksternal. Tahap adaptasi ini bertujuan dalam menyatukan persepsi negara-negara *Arctic Council* jika Tiongkok mampu berperilaku kooperatif di Arktik dan berupaya membangun stabilitas. Motif ini didasari oleh adanya nilai orientasi tentang rencana jangka panjang Tiongkok ke depan tentang Arktik, yang meliputi pemahaman saintifik tentang perubahan iklim serta kebutuhan energi dengan menjalankan jalur ekonomi baru.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif berupaya untuk mencari faktor penyebab atas terjadinya suatu kejadian. Maka variabel atau faktor terjadinya fenomena memiliki hubungan terhadap kausalitas (Sarwono, 2006). Dengan tipe eksplanatif, maka penelitian ini akan menjelaskan faktor penyebab atau variabel independen atas kebijakan luar negeri Tiongkok pada kedekatannya dengan isu strategis regional di Arktik.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini dilaksanakan di tempat tinggal penulis di area Universitas Diponegoro, Semarang. Selain itu juga dilakukan di tempat tinggal asal kelahiran Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Penelitian dengan metode literatur atau *desk research* memungkinkan penulis untuk mendapatkan data-data dan perolehan akses informasi di internet melalui perangkat pribadi.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dituju adalah negara Tiongkok beserta dengan perilaku politik luar negerinya di dalam *Arctic Council* serta kerja sama diluar forum yang menguatkan.

1.8.4 Jenis Data

Data penelitian sekunder ini akan menggunakan studi literatur sebagai sumber utama. Sumber dari studi literatur tersebut ialah buku, jurnal, *commentaries*, dan berita dari media online. Selain itu penulis juga memanfaatkan akses data berupa video, yakni hasil wawancara media. Data-data tersebut digali berdasarkan relevansi yang tepat dan sumber yang kredibel tentang tindakan Tiongkok di *Arctic Council*.

1.8.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder ialah data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui pihak yang sudah terlebih dahulu meneliti tentang topik penelitian tersebut. Perolehan data ini akan dihimpun dari jurnal, buku, berita dari media online, serta hasil wawancara media yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Tiongkok di Arktik.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan tipe *desk research* atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan cara untuk mengumpulkan data melalui literatur yang telah ditulis sebelumnya. Sehingga penelitian ini akan menganalisis literatur terdahulu berupa buku, jurnal, dan artikel online yang kredibel reputasinya mengenai kebijakan luar negeri Tiongkok di wilayah regional Arktik

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Jenis analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan metode analisis kongruen. Cara kerja metode kongruen ialah membuktikan suatu teori atau konsep mampu menjelaskan fakta-fakta berupa data yang ditemukan oleh peneliti. Dengan cara ini, apabila terdapat penjelasan tentang temuan fakta yang konsisten melalui penggunaan teori, maka kemungkinan akan ada hubungan kausal dalam suatu fenomena sosial (Richards & Morse, 2012). Maka dari itu, penulis akan melakukan interpretasi atas temuan data empiris yang ditemukan dari adanya faktor-faktor Tiongkok melakukan kebijakan luar negeri di Arktik. Kemudian, konsep *adaptive behavior* berfungsi guna menjadi penafsir atas tindakan dan perilaku Tiongkok merespons adanya perubahan-perubahan eksternal pada isu strategis di Arktik serta perubahan yang terjadi secara domestik

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan dirumuskan melalui sistematika empat bab dengan rincian penjelasan sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang akan memuat desain dan rancangan penelitian. Bagian ini akan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II akan menjelaskan gambaran umum mengenai aktivitas politik luar negeri Tiongkok di wilayah Arktik yang mendorong Tiongkok melanjutkan eksistensinya di kawasan tersebut

Bab III ialah pembahasan mengenai hasil temuan tentang alasan Tiongkok melanjutkan partisipasinya di Arktik meski terdapat kritik dan restriksi dari negara lain.

Bab IV adalah penutup, yang terdiri atas kesimpulan dan saran penulis untuk kebaruan penelitian selanjutnya.